

Judul : RISIKO KEBOCORAN DATA PRIBADI DI BELANTARA BANK DIGITAL
Tanggal : Senin, 18 April 2022
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 11

Bisnis Indonesia Senin, 18 April 2022

INVESTASI 11



Akselerasi digitalisasi perbankan yang dipercepat oleh kemunculan bank digital bukan tanpa kendala. Maraknya kasus kebocoran data jadi salah satu batu sandungan yang bikin khawatir.

Jika bank digital dan orang Indonesia ibarat jodoh dalam suatu pesta pernikahan, maka sudah pasti pengulumunya adalah pandemi Covid-19. Betapa tidak, pembatasan sosial yang bikin mangkrak serba terbatas telah memicu masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam arus transaksi digital. Rekapitulasi Bank Indonesia (BI) mencatat sepanjang 2021, nilai transaksi ekonomi digital di dalam negeri mencapai Rp39.814,4 triliun, atau tumbuh 45,64%. Bank digital, di sisi lain, menjadi salah satu opsi media transaksi tersebut. Kemudahan pembukaan rekening dan beragam fitur canggih dalam satu ketukan jari merupakan daya tarik.

Sayangnya, lagi-lagi ibarat jodoh, perjalanan rumah tangga bank digital dan masyarakat Indonesia bukannya tanpa kendala. Ada saja batu sandungan yang kemunculan, termasuk perihal isu keamanan data.

Indonesia, bukan rahasia lagi, merupakan salah satu surga kebocoran data pribadi. Sepanjang tahun lalu misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ada setidaknya 43 kasus kebocoran data pribadi dalam skala besar. Rekapitulasi Layanan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) bahkan lebih ekstrem lagi. Mereka mengklaim sepanjang 2021, total ada 535 akun konsumen yang mayoritas berpangkal pada masalah

kebocoran data.

Menurut Ketua YLKI Tulus Abadi, sekitar 51% dari total komoditas aduan yang diterima dalam beberapa tahun terakhir terkait dengan sektor finansial digital.

"Misalnya kasus-kasus terkait masalah perbankan, uang digital hingga pinjol (pinjaman online)", jelasnya.

Selama ini, konsumen kerap jadi kambing hitam karena minimnya kesadaran dalam risiko penyerahan data pada suatu layanan digital. Namun, Tulus pun mengakui bahwa masalah yang lebih besar sebenarnya justru ada pada minimnya jaminan dari penyedia layanan.

"Hal ini bisa memicu penyalahgunaan data pribadi konsumen, entah untuk tujuan komersial ataupun yang lain,"

Kekhawatiran Tulus tersebut tentunya relevan. Berdasarkan survei daring yang dilakukan Ratus terhadap 157 responden acak sepanjang Maret 2022, mayoritas atau sekitar 53% menyatakan kekhawatiran terbesar mereka untuk mendatar bank digital adalah memvol kebocoran data pribadi.

Kekhawatiran ini jauh melebihi ketekutan terhadap aspek-aspek lain seperti tingkat kenyamanan, hingga kesediaan dan kematangan fitur.

Sebaliknya, bank bank digital bukannya tidak berupaya mencegah atau menambal risiko kebocoran tersebut.

PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBNI) misalnya, sejak pertengahan tahun lalu telah mengadopsi penahanan risiko

sekaliber Tencent dan Huawei. Komputasi awan dan infrastruktur digital yang dimiliki kedua raksasa teknologi asal China ini kini menjadi salah satu penunjang layanan perbankan bank-besutan Grup Akaditko tersebut.

"Kami juga perlu terus mengembangkan teknologi perbankan kami agar terus dapat mengurangi celah keamanan yang bisa mengancam nasabah," kata Direktur Utama (DU) PT Bank Jago Tbk. (ARTO) juga mengklaim telah mengambil antisipasi ketat. Mengandalkan ekosistem sebagai daya tarik utama, bank rintisan Jerry Ng dan Grup Northstar ini berkuat kolaborasi ekosistemnya selanjut dilakukan dengan assemen ketat.

ARTO juga berklaim kali berusaha meyakinkan para nasabah dan calon nasabah bahwa layanannya sudah memenuhi standar yang ditetapkan industri perbankan.

"Mitra digital ekosistem tidak akan dapat bekerja dengan kami maupun sebaliknya bila tingkat keamanan siber berada di level rendah," kata Direktur Utama ARTO Kharim Siregar.

Hanya saja, jani jani itu sepertinya sudah dianggap terlampau usang oleh para calon nasabah.



Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhaji Mahendra Siregar saat memimpin uji keputusannya dan melakukan calon Ketua Dewan Komisiner OJK di Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/4).

Aturan-aturan yang ada belum mengadopsi prinsip-prinsip penting perlindungan data pribadi.

dimiliki Arga (24). Menekuni pekerjaan di bidang teknologi, Arga mengaku paham betul risiko yang bisa dia alami bila sembarangan mendaftarkan diri dalam sebuah platform. Bahkan di lembaga seperti perbankan yang sudah diawasi regulator sekalipun.

"Kalau saya lebih suka main aman. Semiminal mungkin lah kalau bisa."

Menurut Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar, kekhawatiran yang dialami generasi melek teknologi seperti Arga dan Arga bukanlah hal berlebihan.

Minimnya kerangka hukum dalam penanganan kasus kebocoran data pribadi merupakan akar masalah terbesar. Akar masalah inilah yang kemudian membuat kasus-kasus tidak temuat dengan baik, yang pada akhirnya justru memunculkan skeptisme di tengah masyarakat.

Karenanya, selama masalah tersebut belum terpecahkan, usaha-usaha mitigasi yang dilakukan oleh bank digital akan cenderung dilihat calon nasabah sebagai usaha melukis di atas air.

"Aturan-aturan yang sudah ada saat ini juga belum mengadopsi prinsip-prinsip penting dalam perlindungan data pribadi. Ada pula aspek yang tumpang tindih, sehingga ada ketidakpastian dalam penanganan terkait perlindungan data pribadi," kata Wahyudi.

Sebagai konteks, pemerintah dan DPR sebenarnya telah mencoretlkan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Namun ironisnya, di tengah arus digitalisasi perbankan yang semakin cepat, pembahasan beleid ini justru seperti jalan di tempat.

Terakhir, akar stagnansi pembahasan ada pada polarisasi pemerintah dan DPR terkait keberlakuan lembaga independen untuk menangani perkara PDP. Penetapan mengklaimkan lembaga tersebut berada di bawah kementerian, sementara DPR masih berkeyakinan bahwa lembaga tersebut harus independen.

Teregas dari pro-kontra di kedua sisi, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Forum) Leticia Kartus menilai belum ada semangat positif yang terlihat dalam pembahasan aturan tersebut.

"[Karena] RUU yang justru penting bagi rakyat, termasuk perlindungan data pribadi justru tertunda bertahun-tahun," D



Pegawai melintas di dekut layar yang menampilkan logo Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta.